



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). RTP bertujuan sebagai bentuk penguatan SPIP dan acuan bagi kegiatan pengendalian risiko.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dengan disusunnya RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian dan penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Bappeda kota Banda Aceh. Terima Kasih.

Banda Aceh, Januari 2025
η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh η



ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196802152001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Manfaat 2

1.5 Ruang Lingkup..... 3

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP 4

2.1 Pengertian SPIP 4

2.2 Tujuan SPIP 5

2.3 Unsur-unsur dalam SPIP..... 5

BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA

KOTA BANDA ACEH 7

3.1 Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Bappeda Tahun 2025 7

3.2 Identifikasi Risiko 10

3.2 Analisis Risiko 15

3.4 Rencana Tindak Pengendalian..... 17

3.5 Informasi dan Komunikasi..... 19

3.6 Pemantauan dan Evaluasi 21

BAB IV PENUTUP..... 24

1. LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu organisasi diukur melalui kesuksesannya didalam merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi instansi pemerintahan, pengelolaan tersebut diatur dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan amanah dari berbagai peraturan yaitu UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara serta UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian intern membutuhkan suatu rencana tindak yang dapat mengantisipasi segala risiko dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang menggambarkan efektivitas suatu organisasi di dalam mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan. RTP merupakan bagian dari SPIP dan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh sebab itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan melakukan pengendalian intern yang didukung oleh rencana tindak di dalam mengendalikan capaian seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bappeda Kota Banda Aceh, selaku instansi penyelenggara kegiatan perencanaan pembangunan, memiliki kewajiban untuk mengontrol dan mengantisipasi seluruh ancaman risiko dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Untuk itu perlu disusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh sehingga seluruh target organisasi dapat tercapai dan pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh juga dapat terealisasi sesuai rencana.

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh; dan
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

1.3. TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan sebagai penguatan SPIP dan acuan bagi pimpinan dan seluruh aparatur Bappeda Kota Banda Aceh di dalam mengendalikan risiko pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025.

1.4. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

1.5. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh. Aktivitas pengendalian mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, rencana tindak pengendalian, komunikasi pengendalian, serta metode pemantauan atas pengendalian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, dan seluruh pegawai, di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut SPI sendiri didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

2.2. TUJUAN SPIP

PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. Untuk itu demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Dalam pelaksanaannya, pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kemudian diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP. Berikut adalah unsur-unsur dalam SPIP seperti yang dijabarkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

1. *Lingkungan Pengendalian*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. *Penilaian Risiko*

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. *Kegiatan Pengendalian*

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. *Informasi dan Komunikasi*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. *Pemantauan*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya oleh pihak eksternal

BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.1. PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN BAPPEDA
TAHUN 2025

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian intern dinilai dengan menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) yang mencakup 8 (delapan) klasifikasi penilaian, yaitu: Penegakan integritas dan nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Kedelapan klasifikasi tersebut diurai kedalam beberapa pertanyaan/kuisisioner dan dinilai oleh 6 (enam) orang responden yang diwakili oleh pejabat struktural pada lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Skala penilaian dan simpulan jawaban dalam kuisisioner penilaian lingkungan pengendalian, ditentukan sebagai berikut:

Tabel. 3.1.1. Skor dan Simpulan Jawaban Terhadap Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan Jawaban	Simpulan Jawaban
1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun	Kurang Memadai
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan	Memadai
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain	

Dari hasil penilaian kuisisioner, teridentifikasi 1 (satu) kelemahan/kerentanan pada Bappeda Kota Banda Aceh ditahun 2025. Kerentanan tersebut masuk klasifikasi penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Kelemahan tersebut memiliki nilai modus 2 dan masuk dalam simpulan

jawaban KURANG MEMADAI. Kelemahan atau kerentanan lingkungan pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2025 tersebut menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut lainnya agar proses pengendalian intern dapat terlaksana dengan maksimal.

Sedangkan 6 (enam) klasifikasi/sub unsur lainnya yaitu klasifikasi penegakan integritas dan nilai etika, klasifikasi komitmen terhadap kompetensi, klasifikasi kepemimpinan yang kondusif, klasifikasi pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan, klasifikasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, klasifikasi perwujudan peran APIP yang efektif, serta klasifikasi hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, teridentifikasi MEMADAI. Secara detail, simpulan hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1.2. berikut ini:

Tabel.3.1.2. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tahun Penilaian : 2025

No	Sub unsur/Klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Memadai	-	Memadai	-
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Kurang Memadai	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembinaan SDM Bappeda
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

3.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan termasuk diantaranya risiko yang mengancam keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan berjenjang mulai dari risiko strategis Bappeda yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh, risiko strategis yang diturunkan dari IKU Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis Bappeda sendiri, maupun risiko operasional pada organisasi Bappeda Kota Banda Aceh. Setiap level risiko tersebut diuraikan baik dari segi penyebab terjadinya risiko hingga dampak yang diakibatkan.

Bappeda sendiri sebagai badan yang mengkoordinir proses penyusunan dokumen perencanaan kota, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh periode 2023 – 2026, mendukung salah satu IKU kota, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut adalah uraian identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025.

Tabel. 3.2.1. Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : RPD 2023-2026
 Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah									
1.1	Sasaran Strategis Pemda: Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Ketidakpuasan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota	RSP.25.36.28.01	Pj. Walikota	Rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Internal/ eksternal	C	Berkurangnya kepercayaan masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kepala Daerah

Tabel. 3.2.2. Identifikasi Risiko Strategis Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif									
1.1	Sasaran Strategis OPD Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	Kepala Badan	Kebijakan yang berubah dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Tidak tercapainya tujuan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dalam RPD	Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO.25.36.28.02	Kepala Badan	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Hasil Rekomendasi Penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD maupun Kota	RSO.25.36.28.03	Kepala Badan	Kurangnya penganggaran untuk kegiatan kelitbangan	Internal/ Eksternal	C	- Belum optimalnya penerapan kebijakan pembangunan yang berbasiskan penelitian- Lemahnya penerapan inovasi-inovasi pembangunan daerah	Pemerintah Kota Banda Aceh

Tabel. 3.2.3. Identifikasi Risiko Operasional Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	Pelaksanaan	RSOO. 25.36.28.01	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Pengumpulan Renja OPD tidak tepat waktu	Internal/ Eksternal	C	Penetapan RKPD tidak tepat waktu	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat

3.3. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko dinilai dari sisi kemungkinan terjadi dan dampak yang dihasilkan oleh suatu risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk melihat skala kemungkinan dan dampak yang dihasilkan. Penilaian skala kemungkinan diberikan dengan metode penilaian 1 sampai dengan 5. Semakin besar skala kemungkinan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu risiko terjadi. Berikut adalah tabel penilaian skala kemungkinan menurut nilai.

Analisis dampak dilakukan untuk menilai skala dampak suatu risiko. Semakin besar nilai risiko maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut. Seperti halnya skala kemungkinan, skala dampak juga diukur melalui nilai 1 hingga 5.

Tabel 3.3.1. Kriteria Resiko

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	1..16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau

Proses penilaian dan analisis risiko yang dilakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural sebagai responden melalui metode Focus Group Discussion (FGD). Setiap responden memberikan pendapat dan penilaian terhadap seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Masing-masing risiko dinilai skala dampak dan kemungkinan yang telah dinilai oleh responden kemudian dirata-ratakan dan menjadi nilai skala dampak/kemungkinan suatu risiko. Nilai rata-rata penilaian skala kemungkinan dan skala dampak masing-masing risiko tersebut kemudian dikalikan menjadi nilai skala risiko. Dari hasil perkalian akan di dapat risiko dengan nilai tertinggi yang kemudian akan diangkat menjadi risiko prioritas Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2025.

Secara detail, seluruh uraian hasil analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh sesuai hasil penilaian responden, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.3.3. Hasil Analisis Risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh				
1	Ketidakpuasan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota	RSP.25.36.28.01	3	2	11
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	4	3	17
2	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO.25.36.28.02	2	3	10
3	Hasil Rekomendasi Penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD maupun Kota	RSO.25.36.28.03	3	2	11
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Renja OPD terlambat disampaikan	RSOO.25.36.28.01	2	3	10

* diisi berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak dan kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Dari hasil analisis terlihat bahwa skor nilai skala risiko tertinggi pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun yaitu *Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD (RSO.25.36.28.01)* tersebut menjadi risiko prioritas Bappeda di tahun 2025. Daftar Risiko Prioritas Bappeda tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.3.4. Daftar Risiko Prioritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	17	Kepala BAPPEDA	Kebijakan lainnya dari pemerintah provinsi dan pusat	Target pembangunan tahunan kota tidak tercapai secara optimal

3.4. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Risiko prioritas yang teridentifikasi sebagai risiko dengan dampak terbesar bagi organisasi membutuhkan rencana tindak pengendalian yang terarah. Rencana tindak disusun dengan memperhatikan uraian pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya, celah pengendalian yang ada, serta dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada pada Bappeda Kota Banda Aceh. Selain itu perlu pula ditetapkan target waktu penyelesaian agar seluruh risiko dapat terkendali dengan baik dan tepat waktu. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	Melaksanakan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD	Adanya proses penyalarsan program kegiatan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan kota	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Kepala Bappeda	Triwulan II

Dari risiko prioritas pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2025, bentuk rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan adalah *Asistensi dan koordinasi dengan OPD*, rencana tindak tersebut direncanakan dilaksanakan pada triwulan kedua.

3.5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi dalam RTP adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Agar rencana tindak yang dibangun dapat terlaksana secara optimal, dibutuhkan media dan sarana komunikasi yang tepat untuk mencapai target sasaran atau penerima informasi. Seperti halnya analisis risiko, penentuan media dan sarana komunikasi rencana tindak pengendalian disusun berdasarkan hasil FGD dengan seluruh pejabat struktural di Bappeda Kota Banda Aceh. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.1. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Asistensi, Rapat, Online meeting, Surat, Surat Edaran	Bappeda	OPD	Triwulan 1 s.d 2	Januari-Juni	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Secara umum, bentuk media dan sarana pengkomunikasian rencana tindak pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya adalah berbentuk Rapat baik rapat langsung maupun online, surat menyurat. Sebagai instansi yang mengelola kegiatan perencanaan kota, maka target sasaran atau penerima informasi yang dilaksanakan tersebut adalah masyarakat dan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Langkah terakhir yang dilakukan dalam pengendalian risiko organisasi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Adapun proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Adapun pemantauan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah berupa pemantauan berkelanjutan yang secara detail berisikan metode pemantauan yang dilakukan bagi setiap rencana tindak pengendalian, penanggung jawab pemantauan, serta waktu pelaksanaannya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana direncanakan. Dokumentasi dan notulensi rapat, laporan progres;

2. Evaluasi Terpisah

Pemantauan lainnya adalah berupa evaluasi terpisah yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pemantauan dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Bappeda Kota Banda Aceh wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dari auditor eksternal maupun internal yang telah melakukan audit/evaluasi/reviu.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan secara langsung kepada Walikota Banda Aceh.

Bentuk/metode pemantauan atas pengendalian intern pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025, beserta rencana dan waktu realisasi pelaksanaan pemantauan dapat dilihat dalam tabel 3.6.1 sebagai berikut.

Tabel 3.6.1. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan 1 dan 2	Januari-Juni	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan uraian tentang upaya Bappeda untuk mengatasi seluruh ancaman dan risiko yang mengganggu Bappeda dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran organisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana tindak pengendalian, identifikasi media/sarana informasi dan komunikasi, serta metode pemantauan yang diperlukan.

Dari analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2025, teridentifikasi risiko prioritas tersebut yaitu 1 (satu) risiko strategis Bappeda Kota Banda Aceh yaitu tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD.

Untuk mengantisipasi risiko strategis tersebut telah disusun rencana tindak pengendalian intern beserta seluruh media/sarana pengkomunikasian dan metode pemantauan yang dibutuhkan. Dengan tersusunnya dokumen RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025 diharapkan seluruh risiko strategis khususnya yang terkait dengan perencanaan kota dapat dikendalikan dengan baik.

Form 1.a

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2025

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	4	3	4	4	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	4	3	3	4	4	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	4	4	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	4	4	3	2	4	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	3	3	4	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	4	3	4	4	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4	2	4	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	4	4	4	2	4	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	2	2	2	2	2	KURANG MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI

Banda Aceh, Januari 2025
 η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 1.b
KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	LHE Inspektorat	Belum terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat	Penegakan integritas dan nilai etika
2	ANJAB ABK	Masih adanya pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dengan kompetensi	Komitmen terhadap kompetensi
3	Hasil penilaian internal/eksternal SPIP	Belum menetapkan Perkada tentang pengelolaan resiko	Kepemimpinan yang kondusif
4	LHE Inspektorat	Penyesuaian Nomenklatur SOTK	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5	Peraturan Walikota Banda Aceh No. 32 Tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Kota Banda Aceh	Pendelegasian kewenangan belum sesuai dengan tupoksi	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6	DPA	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan SDM	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7	LHP Inspektorat	Belum ditindak lanjutnya hasil pemeriksaan pengawasan APIP	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8	Laporan hasil penilaian SAKIP internal	Hasil evaluasi SAKIP OPD belum maksimal difasilitasi oleh OPD terkait Penyusunan dokumen perencanaan	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Banda Aceh, Januari 2025
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 1.c
SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Sub unsur/klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	-	Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	-	Memadai		Memadai	
3	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	-	Memadai		Memadai	
4	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	-	Memadai		Memadai	
5	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	-	Memadai		Memadai	
6	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Kurang Memadai	-	Kurang Memadai	Masih adanya pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dengan kompetensi	Kurang Memadai	Masih adanya pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dengan kompetensi
7	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	-	Memadai		Memadai	
8	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	

Banda Aceh, Januari 2025

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 196802152001121004

Form 2.a
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Sumber Data	: RPD 2023-2026
Visi	:
Misi Strategis RPD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPD	1. Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam 2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum 3. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah 4. Mengoptimalkan kualitas pendidikan 5. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan 6. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial 7. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata 8. Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya 9. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman 10. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana 12. Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga 13. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	3. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Sasaran RPD	1. Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam 2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum 3. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah 4. Optimalnya Kualitas Pendidikan 5. Optimalnya Kualitas Kesehatan 6. Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial 7. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata 8. Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya 9. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman 10. Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga 13. Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
IKU Sasaran RPD	1. Indeks Kota Syariah (IKS) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 4. Indeks Kualitas Pendidikan 5. Indeks Kualitas Kesehatan 6. Jumlah Kunjungan Wisata 7. Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan 8. Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	-
Urusan Pemerintahan Daerah	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Nama Dinas Terkait	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Sasaran: Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM: 1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah
--	---

Banda Aceh, Januari 2025
η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 2.b
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KOTA Banda ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Sumber Data	: Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh 2023-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Sasaran Strategis	: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
IKU Renstra OPD	: IKU TARGET
	1. Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD 100%
	2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD 100%
	3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 100%
Program	1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Tujuan :
Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif
Sasaran :
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif

IKU :
1. Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD
2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD
3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

PROGRAM :
1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Banda Aceh, Januari 2025
η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDL, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 2.c
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KOTA Banda ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Urusan Pemerintahan	: 1 Urusan Perencanaan 2 Urusan Penelitian dan Pengembangan
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Sumber Data	: Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh 2023-2026
Tujuan Strategis	: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
Program dan Kegiatan Utama	Program : 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan: 1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

	2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan 3.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	Sub Kegiatan: 1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 1.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota 1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah 2.1.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.2.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 2.3.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 2.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

	3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 3.2.1 Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah 3.2.2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3.3.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 3.3.1 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan: 1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan 1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 3.a
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKO KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : RPD 2023 - 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah									
	Sasaran Strategis Pemda									
	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota	RSP.2 5.36.2 8.01	Pj. Walikota	Rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Internal/eksternal	C	Berkurangnya kepercayaan masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kepala Daerah

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSADI, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 3.b
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KOTA Banda ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif										
1.1	Sasaran Strategis OPD Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	Kepala Badan	Kebijakan yang berubah dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Tidak tercapainya tujuan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dalam RPD	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100 %	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO.25.36.28.02	Kepala Badan	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	Hasil Rekomendasi Penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD maupun Kota	RSO.25.36.28.03	Kepala Badan	Kurangnya penganggara n untuk kegiatan kelitbangan	Internal/ Eksternal	C	- Belum optimalnya penerapan kebijakan pembangunan yang berbasis penelitian- Lemahnya penerapan inovasi-inovasi pembangunan daerah	Pemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh, Januari 2025

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 196802152001121004

Form 3.c
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KOTA Banda ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	k
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Pelaksanaan	Renja OPD terlambat disampaikan	RSOO.25.36.28.01	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Pengumpulan Renja OPD tidak tepat waktu	Internal/ Eksternal	C	Penetapan RKPD tidak tepat waktu	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ Masyarakat

Banda Aceh, Januari 2025
 η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
 Pembina Utama muda
 Nip. 196802152001121004

Form 4
ANALISIS RESIKO BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	R1		R2		R3		R4		R5		Hasil Rata Rata		Analisis Risiko (Pembulatan)		Skala Risiko
			D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
I	Risiko Strategis Pemko																
1	Ketidakpuasan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota	RSP.25.36.28.01	3	2	3	1	2	2	3	1	2	3	2,6	1,8	3	2	11
II	Risiko Strategis OPD																
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01	3	4	3	2	3	4	5	2	4	2	3,6	2,8	4	3	17
2	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO.25.36.28.02	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2,4	2,6	2	3	10
3	Hasil Rekomendasi Penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD maupun Kota	RSO.25.36.28.03	1	4	2	2	2	2	4	1	5	1	2,8	2,0	3	2	11
III	Risiko Operasional OPD																
1	Renja OPD terlambat disampaikan	RSO.25.36.28.01	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2,0	2,8	2	3	10

Banda Aceh, Januari 2025
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 5
KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang selaras dan aplikatif
Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1						
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28 .01	17	Kepala Badan	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal
III	Risiko Operasional OPD					

Banda Aceh, Januari 2025
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 6
**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/
RTP ATAS ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP atas CEE)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA				
II	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI				
III	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF				
IV	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
V	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT				
VI	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan	Membuat pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda	Triwulan I	Januari
VII	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF				
VIII	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT				

Banda Aceh, Januari 2025
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196802152001121004

Form 7

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1							
II	Risiko Strategis OPD						
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.3 6.28.01	Melaksanakan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD	Adanya proses penyelarasan program kegiatan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan kota	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Kepala Bappeda	Triwulan II
III	Risiko Operasional OPD						
1							

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1							
II	Risiko Strategis OPD						
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Asistensi, Rapat, Online meeting, Surat, Surat Edaran	Bappeda	OPD	Triwulan I sd II	Januari-Juni	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
III	Risiko Operasional OPD						
1							

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1						
II	Risiko Strategis OPD					
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan I sd II	Januari-Juni	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2						
III	Risiko Operasional OPD					
1						

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si

Pembina Utama Muda
 Nip. 196802152001121004

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemko									
1										
II	Risiko Strategis OPD									
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPD	RSO.25.36.28.01		Tidak terjadi	Tidak terjadi		Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Triwulan I sd Triwulan II	Januari-Juni 2025	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
III	Risiko Operasional OPD									
1										

Banda Aceh, Januari 2025
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 196802152001121004



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
JL. NYAK ADAM KAMIL NO. 19A BANDA ACEH TELP (0651) 32398 FAX (0651)
32397
WEBSITE [HTTPS://BAPPEDA.BANDAACEHKOTA.GO.ID](https://bappeda.bandaacehkota.go.id)